

**Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa  
di Kota Makassar**



**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh :

Taslim

Nim : 10500113287

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taslim  
NIM : 10500113287  
Tempat/Tgl.Lahir : Rano Desa Tongko, 25 September 1994  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : BTN. Batara Ugi  
Judul : Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 16 Agustus 2017

Penyusun,

Taslim


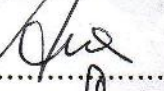

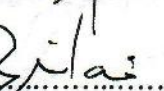
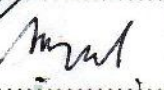
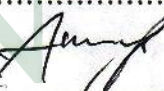
NIM: 10500113287

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar* yang disusun oleh saudara **Taslim**, NIM: 10500113287. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

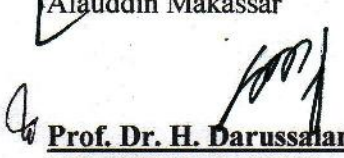
Gowa, 14 September 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin,M.Ag (.....)	
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H (.....)	
Munaqisy I	: Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H (.....)	
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, M.H (.....)	
Pembimbing II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H (.....)	

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN  
Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag**  
NIP.19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SWT beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sekalipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Dalam masa studi sampai hari ini, penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat melalui itu semua dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H dibelakang nama penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis (Bapak Asis, Ibu Nurhaeda) yang tidak pernah lelah membanting tulang mencari nafkah demi membiayai studi penulis. Apapun yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapat begitu banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang

membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah mengizinkan peneliti untuk mengangkat skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar.
4. Bapak Drs. H. Munir Salim, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Ashar Sinilele S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran kepada penulis hingga bisa menyusun skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staf di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Kakak penulis Taufiq S.pd dan teman/sahabat kecil penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

7. Bapak Muhammad Faisal, S.Farm, S.H, Apt, M.H, (Staf Bidang Penyidikan),  
Ibu Dr. Andi Mulyati, Apt, (Staf Bidang Pemeriksaan) yang telah membantu dan menyediakan fasilitas untuk penulis selama melakukan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar.
  8. Keluarga Besar PPL di Kejaksaan Bulukumba yang telah memberikan support kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
  9. Keluarga Besar KKN Reguler Angkatan 53. Posko 18 Desa Rajang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
  10. Teman-teman “IH” kelas F, mulai dari Alex, Dicky, Riyan, Tarmizi, Faldy, Abd Rahman, Syahrul, Samsir, Abd. Muzakkir, Iga, Ajeng, Rini, hijrah, Lina, Sultan, Dafi, Rani, Syanti, Gita, Nurul, dan semua yang tak sempat penulis sebut.
  11. Teman-Teman penulis seperjuangan di Makassar mulai dari. Rahniati Riswana, Erma Windasari, Bahar, Ambal, Acca, Deddy Sofyan, Nuranisa Anas dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
- Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai hambah Allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan Skripsi ini masih banyak di temukan kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.



Makassar, 16 Agustus 2017

Penyusun

Taslim

Nim: 10500113287

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin  
dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ي	Syin	Sy	es dan ye
ا	ad		es (dengan titik dibawah)
د	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a		te (dengan titik dibawah)
ظ	a		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	fat ah dan y	ai	a dan i
اَوْ	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... / آ... ....	Fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
ي	Kasrah dan y		i dan garis di atas
و	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

: m ta

: ram

قيل : q la

يموت : yam tu

#### 4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau ah al-a f l

المدينة الفا ضلة : al-mad nah al-f ilah

: rau ah al-a f l

#### 5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabban

نجينا : najjain

: al- aqq

: nu"ima

: 'duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزال (az-zalزال)

: al-falsafah

: al-bil du

## 7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: ta’mur na

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

## 9. *Laf al-jal lah ( )*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله d null h bill h

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم hum f ra matill h

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)  
Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan:  
Za d, Na r mid Ab ).

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : sub nah wa ta' l  
saw. : allal hu 'alaihi wa sallam  
M : Masehi  
QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4  
HR : Hadis Riwayat





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN LITERATUR.....	xi
ABSTRAK .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Hipotesis.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. Pengertian Perlindungan konsumen .....	10
B. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	13

C. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	17
D. Hak dan kewajiban Konsumen.....	22
E. Pengertian Pelaku Usaha .....	25
F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
G. Perbuatan yang di Larang bagi Pelaku Usaha .....	28
H. Pengertian Makanan Kadaluwarsa .....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan lokasi penelitian.....	36
B. Pendekatan penelitian.....	36
C. Motode pengumpulan data.....	36
D. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil Balai Besar POM di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar .....	48
C. Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	62

DAFTAR PUSTAKA .....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Taslim**  
**Nim : 10500113287**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Judul : Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar**

---

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali di jumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di Kota-Kota besar seperti Kota Makassar sering sekali didapatkan kasus-kasus pelanggaran seperti beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa, beredarnya makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar. Hal ini tidak hanya merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) berkewajiban mensosialisasikan dengan jelas dan detail mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi kepada konsumen dan khalayak ramai. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat judul yaitu : Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar. Berdasarkan judul yang di angkat dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar 2. Bagaimanakah Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar.?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan yang bersumber dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Balai Besar POM di Makassar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris, yang artinya penelitian dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan peranan Balai Besar POM di Makassar juga telah melaksanakan peranannya seperti: 1. Melaksanakan visi dan misi, yaitu, melakukan pengawasan seperti, control pra pasar, control pasca pasar. 2. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan kadaluarsa.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar belakang masalah***

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

---

<sup>1</sup>AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), h. 64-65.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*).<sup>2</sup>

Begitu banyak dapat dibaca berita berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagaimana yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun moril bagi konsumen.

---

<sup>2</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 6.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative sebagaimana disebutkan diatas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu, persoalan melindungi konsumen bahkan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dan kerugian yang menimpa harta bendanya.

Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia – manusia yang sehat jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Sebab hanya ditangan manusia-manusia berkualitaslah pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung secara terjamin.

Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku-pelaku pembangunan.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk

---

<sup>3</sup>Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h.152.



melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan dan menyatakan bahwa pangan halal bagi ummat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencamtumkan keterangan atau tulisan halal pada label.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
الْأَرْضَ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Terjemahanya:

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 10.

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah RI. Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 ayat (1).

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>6</sup>

Ayat tersebut dengan jelas memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (bergizi). Kemudian ditutup dengan peringatan agar manusia tidak mengikuti jejak langkah setan yang sudah di pastikan akan menjerumuskan pada lembah kesesatan.<sup>7</sup>

Makanan yang halal yang di sebutkan dalam ayat tersebut mensyaratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spiritualisme dalam memperoleh dan mengonsumsi makanan. Halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan sunnahnya. Makanan yang kita makan harus jelas asal-usul dan jenisnya.<sup>8</sup>

Dengan aturan-aturan tersebut diatas sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk makanan yang kadaluwarsa dan membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen sehingga ditulislah skripsi yang

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT, Sinar Pustaka Indonesia, 2012), h. 20.

<sup>7</sup>Thobie Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 79.

<sup>8</sup>Thobie Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, h. 80.

berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar?

### ***C. Hipotesis***

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas maka hipotesis dari “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar” adalah makanan kadaluwarsa yang beredar dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa tersebut.

### ***D. Tujuan dan Kegunaan penelitian***

a. Adapun di lakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar.?
2. Untuk mengetahui peranan balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kota Makassar?

b. Kegunaan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kadaluwarsa.
2. Sebagai pohon pemikiran ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang konsumen.

#### ***F. Kajian Pustaka***

Makanan yang kadaluarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat konsumen merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan, mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker. Maraknya kejadian keracunan makanan, sangat berkaitan erat penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pemilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari kasus keracunan.<sup>9</sup>

Akan tetapi, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Akhirnya konsumen dengan senang dan tanpa sadar mengkonsumsi produk-produk makanan tersebut karena penampilan yang menarik dengan harga yang lebih murah. Padahal makanan tersebut dapat membahayakan bagi

---

<sup>9</sup>Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, (Jakarta: April 1996), h 22.

kesehatan. Mengacu pada sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang tanggung jawab produk terdapat tiga substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji (*breach of warranty*). Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen selaku pelaku usaha. Akan tetapi, di dalam Pasal 27 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dirumuskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen,<sup>10</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan Negara haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.

---

<sup>10</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.172.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perlindungan konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”.Diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>1</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/jasa bagainya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

---

<sup>1</sup>Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.1.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.

- a).Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa kebutuhannya, dan menentukan hak-haknya (pasal 3 huruf c);
- b).Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi itu (pasal 3 huruf d);
- c).Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf c);<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyuarakan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 39/284, tentang *guidelines for consumer protection* sebagai berikut :

- a).Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b).Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c).Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen yang memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d).Pendidikan konsumen;
- e).Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f).Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam perlindungan Konsumen*, h. 9.

pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang mengangkut kepentingan mereka.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha ketika ketidak seimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen, seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi lebih kuat dari para pelaku usaha. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikat baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-qur'an adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi, Allah Swt berfirman dalam (QS, Al-Baqarah, 2 : 279)

لَمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahanya :

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu*

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 115.



*bertaubat (dari pengambilan **riba**), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*<sup>5</sup>

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisist mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzallimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzolimi atau menganiaya, hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

## **B. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen sampai sekarang belum memiliki pengertian baku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis. Namun beberapa orang sering mengartikan hukum perlindungan konsumen sama saja dengan istilah hukum konsumen.

Az Nasution membedakan hukum konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Perbedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti dikatakan demikian:

“pada umumnya, hukum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an 1967),h.37.

melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen”<sup>6</sup>

Menurut beberapa pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang dimaksud dengan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah peyediaaan dan penggunaan produk barang dan jasa, antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen didefenisikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Selain dalam undang-undang perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga di atur dalam pasal 383 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berikut ini :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli:

- 1). Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli.

---

<sup>6</sup>N.H.T. Siahaan,*Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 31-32.

<sup>7</sup>N.H.T. Siahaan,*Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, h. 32.

- 2). Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan memakai akal atau tipu muslihat.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. perlindungan konsumen mencakup tiga (3) aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan penjualan.

Adapun asas dan tujuan perlindungan konsumen yaitu asas dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen adalah:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada satu pihak yang

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Poetiteia, 2000), h. 265.

kedudukannya lebih tinggi di banding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

## 2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

## 3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, di harapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta Pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

## 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan undang-undang perlindungan konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.

## 5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana telah di sebut kan sebelumnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya

sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan menjadi pengecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya.

### **C. Sejarah Perlindungan konsumen**

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya.

Bervariasinya produk yang semakin luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>9</sup>

Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (consumers law).

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum Asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.

Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 20010), h.11-12.

Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur Pengadilan.

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR.

Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh Lembaga Konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di Lembaga Keuangan Internasional (IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk.<sup>10</sup>

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan

---

<sup>10</sup> Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen* (Jakarta: Firac, 2001), h. 23.



sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini pun memiliki segi positif dan negatif yaitu:

Segi positif adalah:

1. Dengan adanya Undang-Undang ini maka hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dapat ditanggulangi.
2. Kedudukan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa adalah sama dihadapan hukum.

Segi negatif dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
2. Kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk (pengusaha) jadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.

---

<sup>11</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 72.

3. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat), hak dasar konsumen yaitu:

1). Hak untuk mendapatkan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen itu dirugikan secara jasmani dan rohani.

2). Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 33.

### 3). Hak untuk memilih ( the right to choose )

Dalam mengonsumsi produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan di beli.

### 4). Hak untuk didengar ( the right to be heard )

Hak yang erat kaitanya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk di dengar. Ini di sebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau yang berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.<sup>13</sup> Selain itu, konsumen harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa yang di pasarkan produsen.<sup>14</sup>

Hak konsumen sebagai mana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;

---

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 36.

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), h.48.

4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat konvensasi ganti rugi dan/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak member kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk di edarkan dalam masyarakat. Misalnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen di berikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur, jika mendapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk di dengar,

---

<sup>15</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 31.

memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>16</sup>

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai kewajiban di jelaskan dalam pasal 5 yakni:

1. Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamana dan keselamatan;
2. Beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
3. Membayar sesuia nilai tukar yang di sepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>17</sup>

#### **E. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam suatu transaksi jual beli ada dua pihak yang saling terkait yaitu pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonom.

---

<sup>16</sup>Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, h. 34.

<sup>17</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 34.

Menurut Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam pasal 3 Product Liability Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

#### **F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada pasal 6 UU No.8 tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/jasa yang sama.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah di sebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan kepada kewajiban-kewajiban sebagai mana di atur dalam pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan / mencoba barang dan/jasa tertentu, serta member jaminan dan / garansi atas barang yang dibuat dan/diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/jasa pengganti apabila barang dan/jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>18</sup>

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan bagi pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang di rancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>19</sup>

#### **G. Perbuatan yang di Larang bagi Pelaku Usaha**

Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, Pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak

---

<sup>18</sup>Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, h. 39-41.

<sup>19</sup> Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, h. 42.



konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.

Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

## Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif barang atau jasa.
2. Penggunaan suatu barang atau jasa
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
5. Bahaya penggunaan barang atau jasa.

## Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
2. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang yang lain.
4. Tidak menyediakan barang dengan jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.

5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjial jasa yang lain.
6. Menaikan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obral.

#### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

#### Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain.

#### Pasal 14

Pelaku usah dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujuka untuk diperdagangkan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
3. Memberikan hadiah tidak sesuai yang dijanjikan.

4. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

#### Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemakdaan cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

#### Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang diijanjikan.
2. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan atau prestasi.

#### Pasal 17

Pelaku periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa.
2. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa.
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.
4. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa.
5. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

6. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
7. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

#### **H. Pengertian Makanan Kadaluwarsa**

Makanan kadaluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagian mana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun penjualan produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Makanan kadaluwarsa selalu berkaitan dengan daya simpan makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh

karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut di pandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.<sup>21</sup>

Terdapatnya penurunan mutu produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonella. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak.

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang di produksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah di tetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasan belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaanya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut tidak dapat di jamin oleh produsen.

---

<sup>21</sup>Winarno, *Penentuan batas kadaluwarsa bagi makanan dan minuman*, (Jakarta: YLKI, 1985), H. 29.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain itu, juga melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research, penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

##### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

###### **1. Observasi**

Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu



dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan di catat secara sistematis, serta dapat di kontrol keandalan (reabilitasi) dan kesahihannya (validitasnya).

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan topik tertentu. Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pendapat hasil dari wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan.

## **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penulisan dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi mengenai peranan BBPOM Sulawesi Selatan dalam mengawasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat di Kota Makassar sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Balai Besar POM di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **1. Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar**

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar terletak di jalan Baji Minasa No. 2 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar sangat strategis tepatnya di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi Masyarakat Kota Makassar menjangkau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar tersebut.

Adapun batas-batas letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, sebagai berikut:

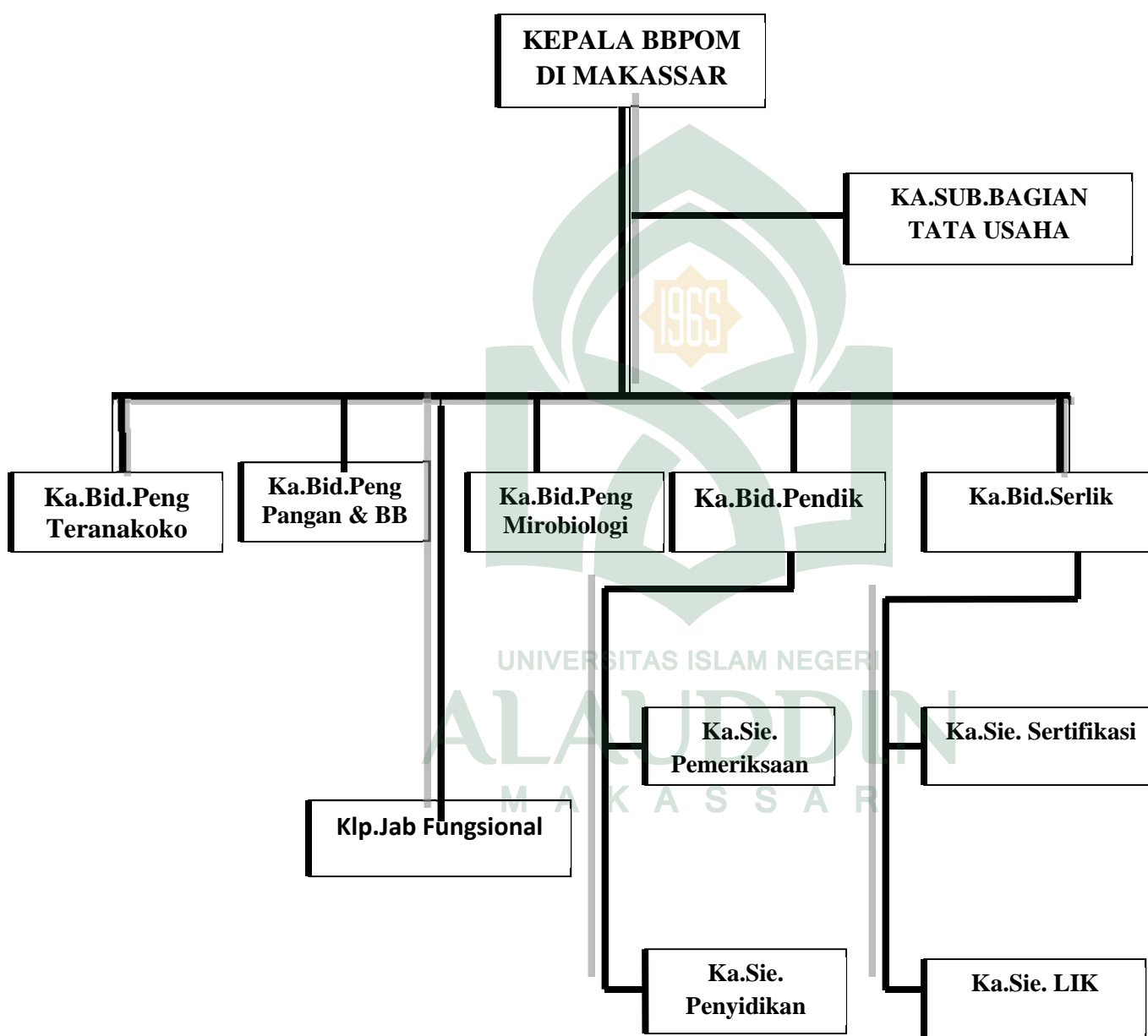
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Senggol Makassar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Stadion sepak bola Andi Matalatta Makassar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Labuan Baji Makassar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Dinas Kehutanan Kota Makassar.

Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar juga tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, seperti Kampus STIEM Bogayya, Akper Muhammadiyah Makassar, SMANegeri 14 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMK Negeri 1 Makassar, Rumah Sakit Kepolisian Daerah Makassar, dll.

## 2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

Gambar Struktur Organisasi BBPOM di Makassar



Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar secara garis besar unit-unit kerja BPPOM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1). Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
- 2). Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 3). Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- 4). Bidang Pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5).Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

6).Sub. Bagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Makassar

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota

Makassar

#### 1) VISI

Visi BBPOM di Makassar sepenuhnya mengacu kepada Visi BPOM 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu:

*"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"*

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

#### Penjelasan VISI

Aman :

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian

Daya Saing :

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar

sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.	nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.
--	--

## 2) MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan Tugas dan Fungsi BBPOM di Makassar sebagaimana yang telah ditetapkan. Misi BPOM yang menjadi acuan BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi yang ditetapkan oleh Badan POM, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum.

1. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Pelaku usaha Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

BBPOM di Makassar dalam melakukan Pengawasan harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, bermutu dan berdaya saing. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi



terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BBPOM di Makassar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan seperti melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.

Terkait dengan bidang kesehatan, peran Kab/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

## 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. BBPOM di Makassar harus mampu mengelola sumber daya yang terbatas dari segi kuantitas dan kualitasnya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dari segi organisasi, BBPOM di Makassar perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip

organisasi pembelajar (learning organization) dengan memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi.

### 3) Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



#### 4) Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja adalah Tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atas jaminan pengawasan BBPOM di Makassar.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Dengan indikator kinerja :
  - a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memenuhi ketentuan;
  - b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Besar POM di Makassar terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di pasaran adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup>

Secara umum perlindungan konsumen tentang makanan yang telah kadaluarsa, rusak, cacat atau bekas sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Bahan yang dipakai.
- b. Komposisi setiap bahan.
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- d. Ketentuan lainnya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar, 08 Mei 2017.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat Informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Oleh Staf bidang pemeriksaan Dr. Andi Mulyati, Apt. lebih jauh menegaskan mengenai informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.<sup>2</sup>

Kemudian Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, mengatakan berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketaanya melalui:

- a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri.

---

<sup>2</sup>Dr. Andi Mulyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 08 mei 2017.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Akan tetapi sayang, konsumen yang menggunakan Lembaga Peradilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini tidaklah ada sama sekali. Langkanya konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan Negeri ini tidak terlepas dari permasalahan biaya yang dibutuhkan dalam beracara, sementara pokok perkara yang akan diperkarakan jauh lebih kecil nilainya dari biaya beracara di Pengadilan.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai Balai Besar POM dalam mengawasi Produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan setiap kasus makanan tanpa izin edar dan kadaluwarsa yang ditemukan tidak ada survey keseluruhan dan pengawasan pun hanyalah pengawasan pasar artinya target dari pengawasan selalu berubah, tidak pernah tetap. Sehingga dalam melakukan pengawasan pihak BBPOM Sul-Sel harus membuat perencanaan terlebih dahulu karena sulit untuk melakukan pengawasan ke semua sarana. Hal ini disebabkan banyaknya tempat yang harus diawasi sehingga tidak sanggup mencapai semua sarana sedangkan pada bagian pemeriksaan hanya berjumlah 23 orang dan di bagi lagi dalam tiga Deputin, dalam satu tim biasanya 2 sampai 3 orang. Oleh karena itu Balai Besar POM Sulawesi-Selatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam melakukan pengawasan.

---

<sup>3</sup>Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar, 12 Mei 2017.

Intensitas pengawasan Balai Besar POM terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar di pasaran dilakukan sebagai otoritas dari berbagai daerah. Balai Besar POM melakukan pengawasan setiap minggu kepasaran terhadap setiap produk makanan yang beredar, dan pengawasan ini lebih diintensifkan menjelang hari-hari besar

Seperti menjelang bulan ramadhan sampai lebaran. Hal ini karena pada saat hari-hari menjelang bulan ramadhan konsumsi masyarakat terhadap makanan meningkat sehingga kemungkinan adanya penjual–penjual nakal karena memanfaatkan kejadian atau menyalahgunakan momen tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar<sup>4</sup>

Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan dilakukan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus makanan tertentu.

Pengawasan rutin yang dilakukan Balai Besar POM melalui program sebagai berikut:

1. Pengawasan sarana produksi
2. Pengawasan sarana distribusi
3. Sampling dan pengujian hasil sampling
4. Pengawasan iklan dan label pangan

---

<sup>4</sup> Dr. Andi Mulyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 08 mei 2017.

## 5. Pengawasan pangan berlabel halal

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan ditingkat peredaran yaitu pengawasan dilakukan pada toko – toko, pasar dan swalayan, atau disebut juga dengan sarana peredaran kalau dalam pengawasan terhadap sarana peredaran ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar/illegal dan kadaluarsa maka pelaku usaha di tegur dan diberi peringatan.

Adapun sanksi apabila terjadi pelanggaran, ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu apabila tingkat risikonya itu rendah atau kategori pelanggarannya itu rendah maka pihak Balai Besar POM melakukan pembinaan kemudian pemanggilan dan setelah itu diberikan peringatan sampai peringatan pra, namun apabila produknya bermasalah maka produk tersebut tetap harus di musnahkan, sedangkan sanksi pidana yaitu apabila produk tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tanpa izin edar dan kadaluwarsa tingkat risikonya juga tinggi maka dikembalikan ke peraturan peundang-undangan sesuai dengan Undang–undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 yang menegaskan bahwa :

“pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”

“berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan



barang/jasa, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, sangat jelas sanksinya”

“ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Pengawasan Obat dan makanan seperti yang diharapkan telah melakukan pungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman, yakni pada tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 17 kasus. Adapun uraian sebagai berikut:

### **Kasus Pangan**

#### **Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar**

<b>Tahun</b>	<b>Non PJ</b>	<b>PJ</b>	<b>Jumlah kasus</b>
2014	4	0	4
2015	3	0	3
2016	5	1	6
s/d Maret 2017	3	1	4
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

**Ket.**

**-PJ : Pro Justicia**

**-Data akhir Maret 2017**

Dari 17 total jumlah kasus di atas terdapat 16 sarana pangan ilegal/ tanpa izin edar dan 1 sarana pangan kadaluarsa.<sup>5</sup>

Dari Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar sudah sangat bagus mengenai peredaran makanan kadaluarsa di buktikan dengan hanya 1 kasus makanan kadaluarsa yang ditemukan beredar di pasaran.

### **C. Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar**

Balai Besar POM di Makassar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) Badan POM yang mempunyai kegiatan utama adalah: melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Untuk mengetahui peran Balai Besar POM mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa di Kota Makassar. Dr. Andi Mulyati, Apt dan Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH,. Mengatakan untuk menjalankan peran Balai Besar POM tidak semata-mata terfokus pada peredaran makanan kadaluarsa saja. Tetapi harus menjalankan secara

---

<sup>5</sup>Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar, 15 Mei 2017.

menyeluruh peran dan fungsi Balai Besar POM tersebut. Sesuai dengan sasaran strategis visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat. Pada Pasal 67 Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menegaskan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Adapun 2 bentuk pengawasan yang dilakukan Balai BPOM dalam mengantisipasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu :

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar, caranya adalah:
  - a. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
  - b. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Selain itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar teknis tersebut.

2. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman. Selama ini secara internasional belum ada keseragaman tentang bagaimana cara menarik produk yang tidak aman dari pasar. Namun bagaimanapun caranya produk-produk yang tidak aman harus ditarik dari pasaran.

Balai BPOM dalam melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yang tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa melakukan beberapa prosedur, yaitu:

1. Pengawasan keserasan pabriknya untuk memeriksa barang tersebut sebelum diedarkan.
2. Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang dan kriteria makanan yang menjamin keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi.
3. Melakukan instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium di Balai Besar POM.
4. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga Standar Nasional. Disamping itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi standar teknis tersebut.

5. Dengan menyediakan layanan informasi melalui stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang tidak layak edar, agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan produk makanan yang aman dan tidak aman.

Sedangkan pengawasan kontrol pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat yaitu:

1. Dengan melakukan penyuluhan ke produsen dalam bentuk pengawasan terhadap barang yang akan dijual pelaku usaha.
2. Memberikan pengawasan ke pelaku usaha agar bisa melakukan pembuatan proses menjual barang yang memadai dengan ketentuan dan harapan, bahwa apa yang dibuat oleh distributor nanti sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Dalam proses pengawasan petugas Balai Besar POM mengambil produk makanan secara acak untuk mengambil produk makanan yang bermasalah, makanan yang diambil secara acak itu dibawa ke kantor kemudian diuji laboratorium, di mana Balai Besar POM membeli semua produk makanan yang bermasalah itu, bukan mengambil secara gratis agar tidak membebani para produsen atau pelaku usaha.
4. Dengan mengawasi tata cara rating (retail) yang baik diberbagai tempat penjualan produsen, seperti dengan menempatkan kelompok minuman dan makanan di tempat khusus makanan.
5. Jika Balai Besar POM menemukan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan baik itu kadaluwarsa atau tidak memiliki izin edar di pasaran, maka

makanan tersebut akan dimusnahkan langsung di tempat tersebut dan yang melakukan pemusnahan tersebut adalah penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.

Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan kadaluarsa maka di BPOM dibentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tentang produk makanan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM. Penyidik BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau benda yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perlindungan konsumen.

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran konsumen.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Terkait dengan pemusnahan barang makanan kemasan tanpa izin edar/illegal dan kadaluarsa, maka produk tersebut langsung diturunkan dan petugas meminta kepada penjual untuk langsung memusnahkannya ditempat saat itu juga. Adapun mengenai pemusnahan tersebut ada tiga kriteria yang dilakukan yaitu :

1. Ada yang langsung dimusnahkan di tempat saat itu juga dan dilakukan oleh penjual bila jumlah yang ditemukan sedikit.
2. Kalau jumlah produk pangan yang ditemukan dalam jumlah banyak maka ada tempat tersendiri untuk pemusnahan barang tersebut, dan yang melakukan pemusnahan penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai BPOM dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang.
3. Tetapi ada juga yang langsung dimusnahkan oleh Balai BPOM dan penjual tersebut menyaksikannya.

Terkait dengan pemusnahan suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan mengandung bahan berbahaya maka apabila produk tersebut berjumlah banyak maka diberitakan ke masyarakat, namun jika produk tersebut jumlahnya sedikit maka tidak ada pemberitahuan ke masyarakat.

Jika melihat dari jumlah produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yang ditemukan di masyarakat maka tugas pokok Balai BPOM dalam melakukan pengawasan masih sangat kurang optimal karena sulit untuk mencakup semua sarana dalam tiap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan hanyalah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan dilakukan secara acak dalam setiap pengawasan, tiap tim dalam melakukan pengawasan berjumlah 2 s/d 3 orang dalam 1 tim. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dengan menjual makanan kemasan tanpa mendapatkan izin dari pihak BPOM demi kepentingannya dan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup>Dr. Andi Mulyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 15 mei 2017.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen di Balai Besar POM di Makassar penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.
  - a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Besar POM di Makassar terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di pasaran adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 yaitu ” segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
  - b. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan perlindungan terhadap konsumen seperti kasus pangan yang telah di tangani dari mulai tahun 2014 s/d maret 2017, dengan menemukan sebanyak 17 kasus dan telah menindak lanjuti dengan cara Pro Justicia dan Non Pro Justicia.
2. Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar.
  - a. Peran Balai Besar POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, melakukan pengawasan seperti, control pra pasar, control pasca pasar.

- b. Balai Besar POM juga telah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan kadaluarsa.
- c. Terkait dengan barang makanan kemasan tanpa izin edar/illegal dan kadaluarsa yang di temukan langsung di tindak lanjuti oleh petugas dan meminta kepada pelaku usaha untuk memusnahkan di tempat.

## **B. Saran**

Sesuai pengamatan penyusun mengenai bentuk perlindungan dan peran yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar, agar konsumen mendapatkan perlindungan secara optimal maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan lintas sector dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana dalam menjamin mutu makanan yang beredar.
2. Balai Besar POM di Makassar seharusnya menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai sarana penunjang melancarkan proses pengawasan di lapangan agar tidak terjadi lagi kecurang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Diperlukan juga upaya aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan beredarnya makanan kadaluarsa dengan memeriksa terlebih dahulu barang makanan atau minuman yang akan di beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Data Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an 1967),h.37.
- Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Binacipta, 1980.
- Halim Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*. Jakarta: Nusamedia, 2010.
- K Zumrotin Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara. Jakarta: April 1996.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT, Sinar Pustaka Indonesia, 2012.
- Meliala Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Miru Ahmad dan yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nasution AZ, *Konsumen dan Hukum :Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Permadi, *Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan Manfaatnya bagi Kegiatan Perlindungan Konsumen*, Makalah pada Lokarya Peningkatan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1988.
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur, 1990.
- Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019.b
- Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo, 2004
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soesilo R, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Poetiteia, 2000

Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Toar Agnes M, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Ujung Pandang: DKI Belanda-Indonesia, 1988.

Tri Celina Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Universitas Indonesia Fakultas Hukum dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Rencana Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

### **Sumber Lain**

#### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

#### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM di Makassar

Hasil wawancara dengan ibu Dr. Andi Mulyati, Apt, Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Makassar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Taslim**, lahir pada tanggal 25 September 1994 tepatnya di Rano Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Azis dan Nurhaeda.

Pertama Kali duduk di bangku pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri 98 Tongko pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah ke M.Ts Negeri Alla dan tamat pada tahun 2010, kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan sekolah ke SMA Muhammadiyah Kalosi dan tamat pada tahun 2013. Dengan melalui jalur UMM pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :**

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TASLIM  
NIM : 10500113287  
Semester/Jurusan : VII/ Ilmu hukum  
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

1. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA MAKANAN KADALUARSA** Di *Samata-Gowa*
2. **PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERDATA**
3. **EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Demikian permohonan ini saya ajukan , atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, 03 November 2016

Mengetahui  
Penasehat Akademik

Pemohon,

(ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag.)

(TASLIM)

14/11/16

*Kehar Syamsudin*





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Nomor : 150 Tahun 2017  
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI  
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan diserahi tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Drs. H. Munir Salim, MH  
2. Ashar Simelele SH., MH


Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Taslim  
NIM : 10500113287  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar Tahun 2016"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 9 Maret 2017

  
**Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

Nomor : 1206 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Taslim  
N I M : 10500113287  
Jurusan : Ilmu Hukum ( IH )  
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Kosumen Akibat Beredarnya  
Makan Kadaluarsa di Kota Makassar"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S. H, M. H.  
Penguji I : Dr. H. M. Saleh ridwan, M. Ag.  
Penguji II : Dr. Andi Safriani, S. H, M. H.  
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.  
2. Nurhayati Wahid

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 11 Agustus 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 355 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan  
Nama : Taslim  
N I M : 10500113287  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan  
Kadaluarsa di Kota Makassar "

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.  
Penguji I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji II : Dr. Andi Safriani, M.H.  
: 1. Mujahidah, SE  
: 2. Nurhayati Wahid

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 20 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

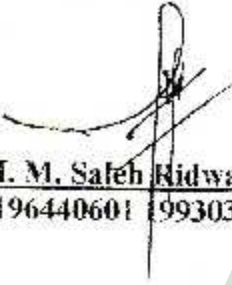
## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi saudara Taslim, NIM: 10500113287, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, 8 Agustus 2017


Penguji I

  
Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag  
NIP.196440601 199303 1 003

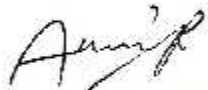
Penguji II

  
Dr. Andi Safriani, S.H., M.H  
NIP.19831122 200912 2 002

Pembimbing I

  
Drs. R. Munir Salim., MH  
NIP.19531231 197803 1 006

Pembimbing II

  
Ashar Sinilele, S.H., M.H  
NIP.19690717 201411 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 86492  
Kampus II Jl. Yasin Limpo No. 36, Sungguninasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/ /2017  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Taslim/10500113287

Kepada Yth;

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. <b>Drs. H. Munir Salim, MH</b> | Sebagai Pembimbing I  |
| 2. <b>Ashar Sinilele, SH., MH</b> | Sebagai Pembimbing II |
| Di-                               |                       |

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Maret 2017  
Waktu : 09.00 - selesai WITA  
Tempat : Ruang 107 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin  
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar Tahun 2016"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Samata, 24 Maret 2017

Wassalam,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Isidamah, SH. MH**

NIP. 196801120 199503 2 001

Nomor : 2910/SL.1/PP.00.9/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 11 Agustus 2017

Kepada

Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H, M. H. (Sekertaris)
3. Dr. H. M. Saleh ridwan, M. Ag. (Penguji I)
4. Andi Safriani, S.H, M.H. (Penguji II)
5. Drs. H. Munir Salim, M. H. (Pembimbing I)
6. Azhar Sinilele, S.H, M. H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Taslim  
NIM : 10500113287  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017  
Buka Sidang : 08.30 WITA  
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/2423/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 20 Juli 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag ( Ketua )
  2. Istiqomah, S.H.,M.H. ( Sekretaris )
  3. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. ( Penguji I )
  4. Dr. Andi Safriani, M.H ( Penguji II )
  5. Drs.H. Munir Salim,MH ( Pembimbing I )
  6. Azhar Sinilele,S.H.,M.H ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Taslim  
N I M : 10500113287  
Jurusan : Ilmu Hukum ( IH )

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017  
Waktu : Pukul 13.00 - 14.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NID 19621016 199003 1 003





BADAN POM

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 871115, 879043, Fax. (0411) 873496  
email : ulpkmks@yahoo.com, kepeg\_bbpommks@yahoo.com

Makassar, 25 APR 2017

Nomor : HM.03.04.104.04.17.1018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan  
di-

Makassar

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 4457/S.01P/P2T/04/2017 tanggal 07 April 2017  
perihal Izin/Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Taslim  
Nomor Pokok : 10500113287  
Program Studi : Ilmu Hukum ( S1)

Kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya dapat membimbing mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data/informasi dari Bid. Pemdik, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Di Kota Makassar", dengan syarat penelitian tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan izin yang diberikan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

ALA UDDIN  
MAKASSAR



Dr. MUHAMMAD GUNTUR

Tembusan :

1. Ka. Bid. Pemdik
2. Ka. Bid. Serlik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN SOMBA OPU  
KELURAHAN PACCINONGANG**

Alamat : Jalan Manggarupi No.109 Paccinongang

**SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL**

Nomor : 456 /KPC/ VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **MEGA REZKY SUHAN**  
Tempat /Tgl lahir : Bau-Bau, 04-05-19992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : BTN Andi Tonro Permai BlokA 7 No. 11

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **7401044405920001**

Tersebut diatas benar penduduk Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan benar Berdomisili / Bertempat Tinggal pada alamat tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat khusus dipergunakan untuk Pendaftaran CPNS.

**Surat Keterangan ini hanya berlaku 1 (Satu) Minggu.**

Paccinongang, 11 Agustus 2017

